

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi dalam kehidupan ketatanegaraannya, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal itulah yang menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami fase naik turun. Hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2013-2016 menunjukkan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Indeks Demokrasi Indonesia**

<b>Tahun</b>	<b>Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)</b>
2013	63,72
2014	73,04
2015	72,82
2016	70,09

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Angka tersebut merupakan skala 0-100. IDI pada tahun 2013 mencapai 63,72 dan mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar 73,02. Namun pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,22 bila dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 72,82 dan tahun 2016 pun mengalami penurunan 2,73 bila dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 70,09. Menurut Suryamin sebagai kepala Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja demokrasi Indonesia berada pada kategori “sedang”. BPS mengklasifikasikan tingkat demokrasi menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Perubahan IDI dari 2015–2016 dipengaruhi tiga aspek demokrasi, yakni kebebasan sipil turun 3,85 poin (dari 80,30 menjadi 76,45), hak-hak politik turun 0,52 poin (dari 70,63 menjadi 70,11), dan lembaga-lembaga demokrasi turun 4,82

poin (dari 66,87 menjadi 76,45). Penghitungan IDI menggunakan empat sumber data, yaitu *review* surat kabar lokal, *review* dokumen (perda, pergub, dll), *focus group discussion* (FGD), dan wawancara mendalam (Badan Pusat Statistik, 2017).

Menurut Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif, Veri Junaidi menuturkan “Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mengindikasikan partisipasi masyarakat yang tinggi, tetapi kinerja elite yang terpotret dari performa partai dan legislatif justru lemah. Artinya ada kinerja kelembagaan demokrasi di Indonesia yang tidak berjalan dengan baik”. Sejalan dengan pendapat tersebut Azyumardi Azra menuturkan “elite politik dan pengambil kebijakan publik berperan sentral dalam memastikan tercapainya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab dalam praktik demokrasi di Indonesia” (*Kompas*, 24/2/2017).

Berdasarkan data tersebut, perkembangan demokrasi di Indonesia masih bersifat labil dan berada dalam kategori sedang. Hal tersebut perlu adanya pembenahan misalnya adanya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Peran pemuda dan mahasiswa sebagai kaum akademisi yang menjadi penerus cita-cita bangsa harus siap dan tanggap dalam memberikan kontribusinya untuk menyelenggarakan kehidupan demokratis di Indonesia. Salahsatu wadah penyaluran aspirasi pemuda dan mahasiswa dalam berpartisipasi yaitu melalui organisasi.

Adapun organisasi yang berhubungan dengan dunia kampus yaitu organisasi kemahasiswaan. Organisasi ini memberikan wahana kepada mahasiswa untuk belajar dan pengalaman dalam menjalin interaksi dengan orang lain sehingga dapat berguna dalam kehidupan bermasyarakat. Era globalisasi saat ini mahasiswa perlu memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengorganisasi dan mengadministrasikan suatu kegiatan (mulai dari persiapan, evaluasi, serta tindak lanjut), memiliki keterampilan berkomunikasi serta mampu memecahkan masalah secara bertanggung jawab (Suartini, T. & Sukandar, A., 2016, hlm. 310). Hal tersebut memberikan gambaran bahwa mahasiswa perlu adanya suatu wadah yang dapat menampung segala ide, kreativitas, dan karya yang dapat disalurkan melalui suatu organisasi.

Organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecerdasan serta integrasi kepribadian sebagai warganegara yang demokratis dan partisipatif melalui berbagai organisasi intra kampus dan organisasi kemasyarakatan dalam masyarakat (Universitas Negeri Semarang/UNNES, 2016). Pemerintah pun sebagai regulator memberi wadah kepada mahasiswa untuk menyalurkan wawasan dan pengalamannya, berdasarkan Kepmendikbud 155/U/1998 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi menyatakan bahwa organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi kemahasiswaan merupakan suatu wadah bagi mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan dan keterampilan baik ide, kreativitas, dan karya yang dapat memperluas wawasan dan integritas kepribadian dalam mencapai suatu tujuan. Sebagaimana menurut pasal 13 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2012 mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional. Mahasiswa memiliki kebebasan dalam mengembangkan potensi dirinya.

Mahasiswa memiliki peran dan tanggungjawab sebagai warga negara yang demokratis dan partisipatif melalui berbagai organisasi, baik di lingkungan kampus ataupun luar kampus. Organisasi intra kampus berperan aktif dalam mengembangkan wawasan dan kemampuan mahasiswa dalam berorganisasi. Organisasi kemahasiswaan memiliki peran yang strategis dalam penanaman nilai-nilai demokratis.

Organisasi kemahasiswaan menjadi media pengembangan diri bagi mahasiswa dalam menumbuhkan nilai-nilai kepemimpinan sehingga memungkinkan potensi kepemimpinan dapat dikembangkan. Selain itu organisasi kemahasiswaan menjadi aset perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas

partisipasi mahasiswa dalam menjalankan birokrasi organisasi kemahasiswaan. Melalui organisasi kemahasiswaan, mahasiswa dapat meningkatkan berbagai kecakapan misalnya meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kedewasaan dan kematangan dalam bersikap, meningkatkan kreativitas dan meningkatkan prestasi (Suroto, 2016, hlm. 104).

Kondisi yang diharapkan dalam organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi adalah terjadinya sebuah keseimbangan proporsi kegiatan kurikuler yang dilaksanakan mahasiswa. Berkaitan dengan hal tersebut bahan kajian yang menjadi program pendidikan yang berhubungan dengan nilai-nilai demokratis yaitu Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). PKn sebagai kajian ilmu kependidikan yang memusatkan perhatian pada pengembangan warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius serta memiliki karakteristik yang multidimensional. Winataputra dan Budimansyah (2012, hlm 5) mendefinisikan PKn sebagai berikut:

*Citizenship or civics education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and, in particular, the role of education (through schooling, teaching, and learning) in that preparatory process.*

Definisi tersebut menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan secara luas mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warganegara, dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar dalam proses penyiapan warganegara tersebut. Penyiapan generasi muda yang demokratis tak hanya dilakukan di lingkungan persekolahan saja namun bisa dilakukan di lingkungan masyarakat. Misalnya generasi muda bisa dilibatkan dalam organisasi-organisasi yang ada di lingkungan masyarakat, hal tersebut dapat menumbuhkan nilai-nilai demokrasi yang nantinya dapat diaplikasikan dalam lingkungan yang lebih luas lagi seperti tatanan negara dan luar negeri.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara yang baik, cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan Pancasila dan UUD 1945. Berkaitan dengan

hal tersebut, Muchtar (2000, hlm 6) mengemukakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan:

Memiliki potensi yang sangat strategis sebagai pendidikan demokrasi, karena secara etimologis dikembangkan dalam tradisi *citizenship education* antara lain mengembangkan nilai demokrasi untuk menegakkan negara hukum. Dengan demikian, sangat menarik dikaji dan dikembangkan agar program pendidikan ini mampu mengembangkan nilai-nilai demokrasi sehingga peserta didik memiliki wawasan dan kemampuan untuk berpikir, bersikap, dan bertindak demokratis.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa PKn adalah program pendidikan yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang berpikir, bersikap, bertindak, berkembang dan berinteraksi dengan cerdas, kritis analitis, berpartisipasi aktif dan bertanggungjawab terhadap diri, lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, fokus dan target utama dari pembelajaran PKn adalah pembekalan pengetahuan, pembinaan sikap, dan pelatihan keterampilan sebagai warga negara demokrasi.

Pendidikan Kewarganegaraan mengemban tugas menyiapkan generasi muda menjadi warganegara yang berdemokratis dan bertanggung jawab untuk mencapai negara demokrasi. Banyak cara membelajarkan demokrasi kepada peserta didik, seperti halnya James McGregor dalam Winataputra (2008, hlm 7) menyatakan bahwa pembelajaran demokrasi mempunyai banyak cara yang dapat ditempuh dengan mengaitkan lingkungan di luar kelas. Seperti halnya mahasiswa di dunia kampus, mereka bisa belajar mengenai demokrasi melalui organisasi di lingkungan universitas ataupun luar universitas. Kedudukan PKn dalam proses demokratisasi adalah dalam rangka transformasi nilai-nilai demokrasi sebagaimana dikemukakan oleh Alexis de Toqueville (dalam Wahab, A. A. dan Sapriya, 2011, hlm. 99) bahwa “*each generation is a new people that must acquire the knowledge, learn the skills, and develop disposition or traits of private and public character that undergird a constitutional democracy*”. Hal tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya proses pembelajaran bagi suatu generasi untuk mewarisi pengetahuan, keterampilan, dan watak atau sifat karakter pribadi maupun publik demi tegaknya demokrasi konstitusional.

Implementasi nilai-nilai demokrasi harus disertai dengan kematangan sosial seseorang. Setiap individu yang mencapai usia dewasa biasanya akan berusaha mencapai tingkat kematangan, karena orang yang telah dewasa memiliki pertumbuhan dan perkembangan sehingga memiliki ciri tertentu dalam kematangan. Menurut Monks (1999, hlm. 2) kematangan didefinisikan sebagai kesiapan individu dalam melaksanakan tugas-tugas perkembangan tertentu dan kemampuan untuk berfungsi dalam tingkat yang lebih tinggi sebagai hasil pertumbuhan. Adapun kematangan sosial menurut Hurlock (1990, hlm. 6) menyatakan bahwa seseorang memperlihatkan kematangan sosialnya dengan menerima orang lain, sebagaimana adanya tidak mengecam atau mencoba mengubah mereka sesuai dengan konsep dirinya sendiri. Kematangan sosialnya juga ditunjukkan dalam wawasan sosialnya yang memungkinkan seseorang menilai dan menyesuaikan diri dengan cepat terhadap orang yang berbeda dalam berbagai situasi sosial. Dalam hal ini peneliti mengaitkan kematangan tersebut dengan kematangan demokrasi. Kematangan demokrasi seseorang dapat ditandai dengan adanya kemampuan seseorang dalam mengembangkan wawasan dan perilaku demokrasi secara cerdas dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan dan ketentuan dalam masyarakat.

Saat ini peran mahasiswa terlihat kurang berperan aktif dalam organisasi kemahasiswaan serta rendahnya partisipasi politik. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya penurunan kesadaran mahasiswa sebagai agen perubahan. Permasalahan nyata terjadi dikalangan mahasiswa ialah sikap apatis terhadap kepemimpinan mahasiswa dalam sebuah organisasi kampus. Hal ini berujung pada rendahnya tingkat jumlah mahasiswa yang mengikuti pemilihan ketua himpunan, rapat kepengurusan, sikap apatis ini juga berdampak pada rendah partisipasi mahasiswa dalam organisasi.

Menurut peneliti masalah pembinaan organisasi mahasiswa merupakan bagian dari pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan kualitas warga negara muda yang cerdas, demokratis, kritis, dan aspiratif. Kematangan demokratis seseorang akan terlihat ketika bisa menyelesaikan suatu persoalan berkaitan dengan hal-hal politik secara cerdas, kritis, dan bertanggungjawab.

Pemuda bertanggungjawab terhadap negara dan pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia dengan membangkitkan semangat kepedulian terhadap masalah sosial yang merupakan salah satu tugas PKn, khususnya PKn sebagai domain sosialkultural atau PKn (*community civics*). Atas pemikiran tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Organisasi Kemahasiswaan terhadap Peningkatan Kematangan Demokrasi Mahasiswa (Studi *Survey* pada Organisasi BEM Rema UPI Bandung)”

### **B. Identifikasi Masalah**

1. Secara kuantitatif, mahasiswa yang berpartisipasi dalam organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi jumlahnya relatif sedikit.
2. Kematangan demokrasi perlu dibangun bagi setiap warga negara yang salahsatunya kematangan demokrasi bagi mahasiswa baik dalam intern kampus maupun ekternkampus. Dalam intern kampus sudah menjadi tugas dan tanggungjawab kampus dan organisasi kamahasiswaan. Sedangkan dalam ektern kampus sudah menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah dan masyarakat untuk melakukan pembinaan organisasi.
3. Peran organisasi kemahasiswaan sangat penting dalam membina, mengembangkan dan membangun kematangan demokrasi bagi mahasiswa sehingga membentuk mereka menjadi mahasiswa yang kritis dan cerdas dalam menghadapi berbagai permasalahan bangsa dan negara.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah sejauhmana pengaruh organisasi kemahasiswaan untuk meningkatkan kematangan demokrasi mahasiswa.

Adapun rumusan masalah dari permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi organisasi kemahasiswaan BEM Rema UPI Bandung?
2. Bagaimana deskripsi tingkat kematangan demokrasi mahasiswa anggota BEM Rema UPI Bandung?

3. Adakah hubungan signifikan antara organisasi kemahasiswaan dengan tingkat kematangan demokrasi mahasiswa?
4. Jika ada, seberapa besar kontribusi organisasi kemahasiswaan terhadap tingkat kematangan demokrasi mahasiswa?

#### **D. Tujuan Penelitian**

##### 1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui dan memperoleh gambaran secara faktual dan aktual mengenai kondisi, proses, dan pengaruh organisasi kemahasiswaan terhadap kematangan demokrasi mahasiswa.

##### 2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Kondisi organisasi kemahasiswaan BEM Rema UPI Bandung
- b. Kondisi tingkat kematangan demokrasi mahasiswa anggota BEM Rema UPI Bandung
- c. Hubungan signifikansi antara organisasi kemahasiswaan dengan tingkat kematangan demokrasi mahasiswa
- d. Kontribusi organisasi kemahasiswaan terhadap tingkat kematangan demokrasi mahasiswa

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Dari segi teori

Kematangan demokrasi setiap warga negara memberi kontribusi terhadap penyelenggaraan ketatanegaraan, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi dunia akademisi terutama mengenai peningkatan kematangan demokrasi mahasiswa melalui peranan organisasi kemahasiswaan.

##### 2. Dari segi kebijakan

Memberikan kontribusi kepada pemerintah sebagai pemangku kebijakan untuk lebih serius memperhatikan aktivitas mahasiswa di dunia kampus sehingga



adanya organisasi kemahasiswaan intra kampus dapat meningkatkan kematangan demokrasi mahasiswa.

### 3. Dari segi praktik

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi terhadap permasalahan yang dialami bangsa Indonesia khususnya mengenai tingkat kematangan demokrasi.

### 4. Dari segi sosial

Mahasiswa sebagai *agent of change* memiliki peranan tidak hanya dalam dunia akademisi saja tetapi harus memiliki kepekaan sosial. Oleh karena itu, melalui organisasi kemahasiswaan diharapkan tingkat kematangan demokrasi mahasiswa dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat luas.

## **F. Struktur Organisasi Penelitian**

### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

### Bab II Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi tentang teori yang sedang dikaji dan kedudukan masalah penelitian dalam bidang ilmu yang diteliti. Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai kajian tentang organisasi kemahasiswaan, kajian tentang demokrasi, kajian tentang pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi, dan penelitian terdahulu.

### Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini berisi penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian, termasuk beberapa komponen seperti lokasi dan subjek penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, penjelasan istilah, instrumen penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab IV ini terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan yaitu pengolahan atau analisis data untuk menghasilkan temuan berkaitan dengan masalah

penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesis, tujuan penelitian, dan pembahasan atau analisis temuan.

#### Bab V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan atas jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran.